

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirnat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun mendatang.

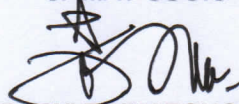
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya kami sangat berharap adanya koreksi, saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal, sehingga akan dapat mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sugio, Januari 2024

CAMAT SUGIO



YOSEP DWI PRIHATONO, SH. MH

Pembina Tk.I

NIP. 19670629 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Data Umum Organisasi.....	10
D. Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2023	13

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis.....	15
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
A.1 Pencapaian Kinerja	20
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	21
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra	21
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.....	22
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	24
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran	26

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	30
B. Saran	30

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan Visi Kabupaten Lamongan yakni “ **Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi 5 Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

“ Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi “

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sekaligus memenuhi asas akuntabilitas sebagai salah satu amanat Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sebagai salah satu instansi Pemerintah, OPD Kecamatan Sugio berkewajiban untuk menyusun laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai perwujudan kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam melaksanakan Visi dan Misi pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tujuan yang dicapai OPD Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Sasaran yang dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama tahun 2023 yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum pelaksanaan tujuan dan sasaran berhasil dengan baik. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2023 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKjIP ini disusun, merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman serta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama Tahun 2023.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 – 2026 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah 2023 dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Camat mempunyai **tugas** memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat memiliki **fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

- l. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Sekretariat mempunyai **tugas** merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **tugas-tugas** yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
 - g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;

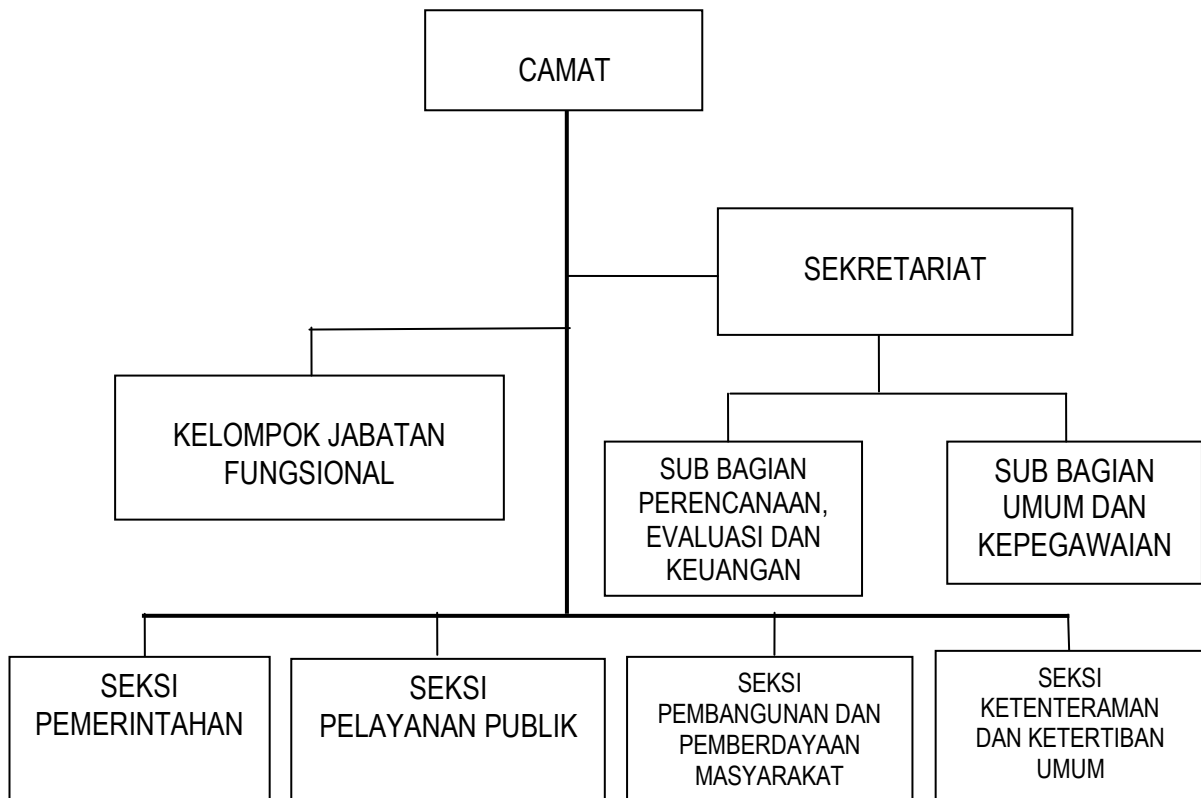
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - i. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - k. melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - c. melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- h. melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

- i. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



C. DATA UMUM ORGANISASAI

1. Personil

NO	JABATAN STRUK-TURAL	JML	PANGKAT/ GOL.RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Camat	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	S-2	1	
2.	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
3.	Kasi	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
		1	Penata Tk.I (III/d)	1	S-2	1	
		1	Penata (III/c)	1	S-1	1	
4.	Kasubag	1	Penata Tk. I (III/d)	1	S-2	1	
		1	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S-2	1	
5.	Staf		Penata Tk.I (III/d)	1	S-1	1	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1	SMA	1	
			Pengatur Tk. I (II/d)	4	SMA	4	
			Pengatur (II/c)	3	SMA	3	
			Pengatur (II/c)	1	D-3	1	
			Tenaga Kontrak	5	S-1	5	
			Tenaga Kontrak	2	SMA	2	
JUMLAH		7		24		24	

2. Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JML	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pendopo Kecamatan	1	
2	Kantor Camat	1	
3	Kantor Sekretariat	1	
4	Rumah Dinas Camat	1	

5	Kantor PKK	1
6	Kendaraan Roda 4	1
7	Kendaraan Roda 2	7
8	Komputer	11
9	Printer	12
10	Komputer Simduk	2
11	Laptop	7
12	Almari	11
13	Filling Kabinet	3
14	Meja Kerja	26
15	Kursi Lipat	31
16	Kursi Kayu Panjang	2
17	Kursi Elephan	41
18	Kursi Hadap/Kursi Kerja	4
19	Televisi	5
20	Warreles	1
21	Meja Tamu	3
22	Meja Rapat	12
23	Podium	1
24	Papan data Penduduk	1
25	Tempat Tidur	1
26	Radio Gram	1
27	Sound system	5
28	AC / Mesin Pendingin	11
29	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1
30	LCD Proyektor	1
31	Tabung Pemadam Kebakaran	1
32	Kamera	1
33	Gergaji Mesin	1
34	Kulkas	1

3. Pembiayaan

BELANJA DAERAH PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2023

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1					2	3	4
7	01				KECAMATAN	2.792.555.800	Pertahun
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.666.459.200	Pertahun
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	Pertahun
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	Pertahun
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.048.483.800	Pertahun
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.026.828.000	Pertahun
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.655.800	Pertahun
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.005.700	Pertahun
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.005.700	Pertahun
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.316.000	Pertahun
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.501.000	Pertahun
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	Pertahun
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.225.000	Pertahun
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000	Pertahun
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.270.000	Pertahun
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.795.700	Pertahun
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	42.515.200	Pertahun
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.280.500	Pertahun
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.858.000	Pertahun
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000	Pertahun
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.510.000	Pertahun
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.348.000	Pertahun
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	Pertahun
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	Pertahun
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	Pertahun
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.000.000	Pertahun
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000	Pertahun
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.000.000	Pertahun
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000	Pertahun
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	Pertahun

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.506.600	Pertahun
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.006.600	Pertahun
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.700.000	Pertahun
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.306.600	Pertahun
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.500.000	Pertahun
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.500.000	Pertahun
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.835.000	Pertahun
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.835.000	Pertahun
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.835.000	Pertahun
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000	Pertahun
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	Pertahun
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	Pertahun
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.775.000	Pertahun
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.775.000	Pertahun
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	Pertahun
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	Pertahun
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.755.000	Pertahun
					Jumlah Belanja	2.792.555.800	Pertahun

Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sugio tahun 2023 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.792.555.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.663.572.381,00 atau mencapai 95 %.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja OPD Kecamatan Sugio selama Tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan antara lain; a. latar belakang penulisan LKjIP; b. tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi; c. data umum organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja berisikan antara lain; a. rencana strategis; b. Rencana kinerja, program dan kegiatan tahun 2023; c. Perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sugio terdiri dari; a. Capaian kinerja organisasi yang meliputi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, perbandingan

realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/Renstra, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan, analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja; b. Realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi a. Kesimpulan; b. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN berisi antara lain; a. Matriks rencana strategis (RS); b. Pengukuran kinerja (PK) tahun 2023; c. Perjanjian kinerja tahun 2023; d. Lampiran lainnya (penghargaan, inovasi dll).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkan kembangkan seluruh potensi yang ada.

1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran strategis **tujuan** dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :

- i. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan.
- ii. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi.
- iii. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik.

Indikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2023, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan :
 - Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada RKPD
- b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi :
 - Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.
- c. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik :
 - Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan.
 - Meningkatnya pelayanan perijinan

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2023 sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam meningkatkan

penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi sub kegiatan :
 - a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi sub kegiatan :
 - a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- c) Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang telah ditetapkan OPD Kecamatan Sugio Tahun 2023 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.792.555.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,95
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	10 Desa

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.666.459.200,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.000.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.506.600,00	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.835.000,00	APBD
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.755.000,00	APBD
JUMLAH		2.792.555.800,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2021 - 2026, telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang didistribusikan pada sekretariat dan seksi - seksi di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 (Lima) tujuan dan 5 (Lima) sasaran. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 6 (Enam) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) sub kegiatan.

Perbandingan pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Adapun Perbandingan capaian kinerja dan analisa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A.1 Pencapaian Kinerja

Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Keterangan
Uraian	Indikator		Target	Capaian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	95	Berhasil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	%	100	99	Sangat Berhasil
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	%	100	99	Sangat Berhasil
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase desa yang melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum	%	100	98	Berhasil
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase forum kecamatan	%	100	98	Berhasil
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa naik kelas	%	100	98	Berhasil

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran		Tahun 2022		Tahun 2023	
Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.660.833.828	94%	2.539.454.981	95%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	35.644.900	99%	22.692.900	99%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	46.186.500	100%	42.009.800	99%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase desa yang melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum	-	-	9.686.400	98%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase forum kecamatan	-	-	9.817.300	98%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa naik kelas	72.486.600	99%	39.911.000	98%

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra

Sasaran		TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2023
Uraian	Indikator			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,62%	95%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100%	99%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	100%	99%	100%
Program Koordinasi	Prosentase desa yang	100%	98%	100%

Ketentraman dan Ketertiban Umum	melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase forum kecamatan	100%	98%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa naik kelas	23,81%	98%	100%

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Uraian	Indikator	Standar Nasional Th 2023 (%)	Realisasi Th 2023 (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	95%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	99%	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan	98%	98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan bulanan	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja, laporan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	95%	95%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	95%	95%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	82%	82%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	99%	99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas yang tercukupi	98%	98%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	98%	98%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	93%	93%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	69%	69%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat kantor yang tersedia	100%	100%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	99%	99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55%	55%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat	87%	87%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pelayanan kantor tenaga kerja administrasi/teknis kegiatan	95%	95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	80%	80%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	96%	96%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	98%	98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan yang terpenuhi	95%	95%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	78%	78%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	99%	99%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang dibina	98%	98%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta dalam rapat	98%	98%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	99%	99%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang ada di kecamatan	99%	99%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	99%	99%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	99%	99%

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta dalam forum	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang di bina	99%	99%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi di bidang ketahanan pangan dan keluarga	97%	97%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	97%	97%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase desa yang melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum	98%	98%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan keamanan dan ketentraman	98%	98%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah konflik desa yang ditangani	98%	98%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase forum kecamatan	98%	98%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase jumlah forum yang dilaksanakan	98%	98%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	98%	98%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa naik kelas	98%	98%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, social dan pembangunan wilayah	98%	98%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	97%	97%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	96%	96%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah usulan desa dalam rapat	99%	99%

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana dan Sarana Prasarana)

Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 24 orang, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 17 orang PNS sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) orang staf PNS, akan tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio berjalan dengan optimal.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.792.555.800,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 2.663.572.381,00 atau sebesar 95 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 128.983.419,00 atau sebesar 5 %, yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL A.6.1
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

No	Sasaran	Indikator	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1.	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	2.689.459.200	2.562.147.881	95,27
2.	Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah desa maju	103.096.600	101.424.500	98,38

TABEL A.6.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	100	95,27	4,73
2.	Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah desa maju	100	98,38	1,62

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Sugio Tahun 2023 ditetapkan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2023 mampu melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreak down dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp. 2.792.555.800,00 dengan rincian :

Di realisasikan untuk belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 2.663.572.381,00

Total sisa anggaran sebesar Rp.128.983.419,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) tidak diserap.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume sub kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 12.000.000,00 volume 12 bulan kegiatan, dipergunakan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak dan makanan minuman rapat pada OPD Kecamatan Sugio, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.808.450,00 atau 98% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 12 bulan atau 98 % (berhasil);
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 digunakan untuk biaya atk, kertas dan cover dan makanan minuman rapat. Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.995.200,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100% (sangat berhasil);
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan komputer dan makanan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.997.400,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil);
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 2.026.828.000,00 volume kegiatan berupa gaji dan tunjangan ASN, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.928.282.939,00 atau 95 %, realisasi kegiatan 95 % (berhasil);

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan komputer dan makanan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp.8.235.200,00 atau 82% (berhasil);
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 11.655.800,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan komputer dan makanan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp.11.593.200,00 atau 99% (sangat berhasil);
7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 37.005.700,00 volume kegiatan untuk belanja pakaian dinas harian, korpri dan batik tradisional, realisasi keuangan sebesar Rp. 36.477.000,00 atau 98% (berhasil);
8. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 3.501.000,00 volume kegiatan untuk alat listrik, realisasi keuangan sebesar Rp.2.413.900,00 atau 69% (berhasil);
9. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adanya pengurangan anggaran/perubahan anggaran;
10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 40.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, benda pos dan bahan komputer adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 39.855.100,00 atau 100% (sangat berhasil);
11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 13.225.000,00 volume kegiatan untuk bahan cetak adapun realisasi keuangan sebesar Rp 13.129.000,00 atau 99% (sangat berhasil);
12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 4.320.000,00 volume kegiatan untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 2.370.000,00 atau 55% (berhasil);
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 19.270.000,00 volume kegiatan untuk atk, bahan computer,

makanan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 16.827.000,00 atau 87% (berhasil);

14. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 42.515.200,00 volume kegiatan untuk alat kantor kursi dan lemari adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 42.445.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
15. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 18.280.500,00 volume kegiatan untuk belanja modal alat bengkel dan belanja modal komputer adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 18.247.200,00 atau 100% (sangat berhasil);
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 52.000.000,00 volume kegiatan untuk tagihan air dan tagihan listrik adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 41.689.712,00 atau 80% (berhasil);
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 5.510.000,00 volume kegiatan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 5.293.800,00 atau 96% (berhasil);
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 260.348.000,00 volume kegiatan untuk jasa tenaga administrasi, kebersihan, keamanan dan iuran jaminan/asuransi adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 255.211.580,00 atau 98% (berhasil);
19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 volume kegiatan untuk bahan bakar dan pelumas, suku cadang dan pembayaran pajak adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 15.683.300,00 atau 78% (berhasil);
20. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 70.000.000,00 volume kegiatan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 69.900.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
21. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 8.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas cover dan makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 7.879.200,00 atau 98% (berhasil);
22. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 volume

kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat dan makanan minuman jamuan tamu adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 14.813.700,00 atau 99% (sangat berhasil);

23. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.700.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat dan belanja jasa kantor adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 20.628.500,00 atau 100% (sangat berhasil);
24. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 9.306.600,00 volume kegiatan untuk biaya atk, serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 9.222.300,00 atau 99% (sangat berhasil);
25. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 12.500.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 12.159.000,00 atau 97% (berhasil);
26. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 9.835.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 9.686.400,00 atau 98% (berhasil);
27. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, bahan komputer serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.817.300,00 atau 98% (berhasil);
28. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, bahan cetak, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 9.743.800,00 atau 97% (berhasil);
29. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 8.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 7.678.000,00 atau 96% (berhasil);
30. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 22.755.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 22.489.200,00 atau 99% (sangat berhasil);

BAB IV

PE N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Sugio Tahun 2023 dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Sugio berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2023 memuat 6 Program, 14 Kegiatan, 30 sub kegiatan dan mencapai 95 % yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tercapai, namun secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

B. SARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 ini merupakan tahun Ketiga pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 - 2026 yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dari hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program secara umum tentunya banyak kekurangan - kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya sarana dan prasarana kantor.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP tahun 2023. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun- tahun yang akan datang.

L A M P I R A N

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)
OPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2021 - 2026

INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO
 VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
 MISI 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,
 serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai
 Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	1. Meningkatkan efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima 3. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan aparatur	1. Melakukan bimtek pelayanan dan sosialisasi setiap tribulan serta mengembangkan inovasi pelayanan 2. Melakukan penyebaran kuisiner kepada masyarakat guna mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan Sugio	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat serta menyediakan data desa mandiri pembinaan pemerintah desa/kelurahan	1. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan 2. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman	Melakukan pembinaan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

OPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET %	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input: Dana Yang Dibutuhkan	Rp	12.000.000	11.808.450	98	
		Output: Jumlah laporan perencanaan	Laporan	7	7	100	
		Outcome: Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	%	100	11.808.450	98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input: Dana Yang Dibutuhkan	Rp	10.000.000	9.995.200	100	
		Output: Jumlah laporan bulanan	Laporan	5	5	100	
		Outcome: Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	%	100	9.995.200	100	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Outcome: Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	Rp laporan %	10.000.000 6 100	9.997.400 6 9.997.400	100 100 100	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp pegawai %	2.026.828.000 20 100	1.928.282.939 20 1.928.282.939	95 100 95	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Rp laporan %	10.000.000 3 100	8.235.200 3 8.235.200	82 100 82	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp laporan %	11.655.800 10 100	11.593.200 10 11.593.200	99 100 99	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp Paket %	37.005.700 25 100	36.477.000 25 36.477.000	98 100 98	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome:	Rp Paket %	3.501.000 10 100	2.413.900 10 2.413.900	69 100 69	

		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Outcome: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	-	-	Perubahan Anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah jenis alat kantor yang tersedia Outcome: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp jenis %	40.000.000 10 100	39.855.100 10 39.855.100	100 100 100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp Paket %	13.225.000 5 100	13.129.000 5 13.129.000	99 100 99	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp jenis	4.320.000 3	2.370.000 3	55 100	

		Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	100	2.370.000	55	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah peserta rapat Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp Peserta %	19.270.000 150 100	16.827.000 150 16.827.000	87 100 87	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket mebel yang disediakan Outcome: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp item %	42.515.200 4 100	42.445.000 4 42.445.000	100 100 100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Outcome: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp item %	18.280.500 3 100	18.247.200 3 18.247.200	100 100 100	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan penyediaan	Rp laporan	52.000.000 2	41.689.712 2	80 100	

		jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec	%	100	41.689.712	80	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp Jenis %	5.510.000 4 100	5.293.800 4 5.293.800	96 100 96	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah jasa pelayanan umum kantor Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp orang %	260.348.000 10 100	255.211.580 10 255.211.580	98 100 98	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Rp Unit %	20.000.000 7 100	15.683.300 7 15.683.300	78 100 78	

		Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp unit %	70.000.000 4 100	69.900.000 4 69.900.000	100 100 100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah peserta dalam rapat Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp peserta %	8.000.000 200 100	7.879.200 200 7.879.200	98 100 98	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah pelayanan yang ada di kecamatan Outcome: Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp Jenis pelayanan %	15.000.000 10 100	14.813.700 10 14.813.700	99 100 99	

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Input: Dana Yang Dibutuhkan	Rp	20.700.000	20.628.500	100	
		Output: Jumlah peserta dalam forum	desa	21	21	100	
		Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	%	100	20.628.500	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input: Dana Yang Dibutuhkan	Rp	9.306.600	9.222.300	99	
		Output: Jumlah desa yang dibina	desa	21	21	100	
		Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	%	100	9.222.300	99	
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Input: Dana Yang Dibutuhkan	Rp	12.500.000	12.159.000	97	
		Output: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	keluarga	300	300	100	
		Outcome: Tercapainya keluarga yang sejahtera	%	100	12.159.000	97	

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah konflik desa yang ditangani Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang keamanan dan ketentraman	Rp	9.835.000	9.686.400	98	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			desa	21	21	100	
			%	100	9.686.400	98	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Outcome: Jumlah forum yang telah terlaksana	Rp	10.000.000	9.817.300	98	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			dokumen	12	12	100	
			%	100	9.817.300	98	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah desa yang di fasilitasi Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan wilayah	Rp	10.000.000	9.743.800	97	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			desa	21	21	100	
			%	100	9.743.800	97	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah desa yang di fasilitasi Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan wilayah	Rp desa %	8.000.000 21 100	7.678.000 21 7.678.000	96 100 96	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah usulan desa dalam rapat Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan wilayah	Rp desa %	22.755.000 21 100	22.489.200 21 22.489.200	99 100 99	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP DWI PRIHATONO, SH.MH**

Jabatan : Camat Sugio Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

Lamongan, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT SUGIO

YOSEP DWI PRIHATONO, SH.MH
Pembina Tk.I
NIP. 19670629 199803 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

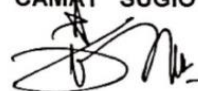
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,95
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	10 Desa

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.666.459.200,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.000.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.506.600,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.835.000,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	10.000.000,00	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.755.000,00	APBD
	JUMLAH	2.792.555.800,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT SUGIO



YOSEP DWI PRIHATONO, SH.MH
Pembina Tk.I
NIP. 19670629 199803 1 004

PENGHARGAAN / INOVASI KECAMATAN SUGIO PADA TAHUN 2023

1. Terbaik 1 Lomba Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) Tahun 2023
2. Terbaik 2 Audit Kearsipan Internal Tahun 2023
3. Juara Harapan III Lomba Paduan Suara Kategori Kecamatan Dalam Rangka HUT KORPRI ke 52 Tahun 2023
4. Top 10 Lomba Bersih Sampah Liar Kecamatan Tahun 2023
5. Inovasi Waduk Gondang (Waktunya Digunakan untuk Gotong Royong dan Tandang)